

**Implementasi Perencanaan Komunikasi  
Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan PSBB  
(Pembatasan Sosial Bersekala Besar)  
di Jakarta**

M. Hamdan Yuwafik  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
(E-mail: afikhmdan@gmail.com)

Hanifa Rizky  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
(E-mail: hanifarizky94@gmail.com)

Sunarto As  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
(E-mail: narto\_as@yahoo.com)

**Abstract**

*This paper tries to describe the implementation of local government communication planning in implementing PSBB in Jakarta and its correlation with communication planning theory. This paper uses the content analysis method. This method discusses in depth the contents of written or printed information in mass and electronic media, with an observational approach to the implementation of Jakarta Provincial government policies related to the PSBB policy. The observations showed that the implementation of communication planning went well. The success of implementation according to Merilee S. Grindle, is influenced by two large variables, namely the content of the policy (content of policy) and the implementation environment (context of implementation). These variables include the extent of the interests of the target group, the types of benefits received by the target group, the desired changes, the accuracy of the location of a program, the mention of the implementor in detail, and adequate resources. The PSBB policy undertaken by the Provincial Government of DKI Jakarta has gone through several stages in advance to achieve the stated goals and objectives and their activity programs. These stages are the preparation phase, the socialization stage, the implementation phase, and the supervision stage.*

**Keywords:** *Implementation, Communication Planning, PSBB, DKI Jakarta*

### **Abstrak**

Tulisan ini mencoba menggambarkan implementasi perencanaan komunikasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan PSBB di Jakarta serta korelasinya dengan teori perencanaan komunikasi. Tulisan ini menggunakan metode *content analysis*. Metode ini membahas mendalam isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa maupun elektronik, dengan pendekatan pengamatan terhadap implementasi kebijakan pemerintah daerah Provinsi Jakarta terkait kebijakan PSBB. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa implementasi perencanaan komunikasi berjalan dengan baik. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle, dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, perubahan yang diinginkan, ketepatan letak sebuah program, penyebutan implementornya dengan rinci, dan sumberdaya yang memadai. Kebijakan PSBB yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melewati beberapa tahap terlebih dahulu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan beserta program-program kegiatannya. Tahap-tahap tersebut adalah tahap persiapan, tahap sosialisasi, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Perencanaan Komunikasi, PSBB, DKI Jakarta*

### **A. PENDAHULUAN**

Kasus penyebaran COVID-19 (Corona Virus Disease-2019) yang berasal dari kota Wuhan, Cina sedang menjadi topik utama di seluruh dunia. Bukan hanya penularannya yang cepat dan belum ditemukan vaksin serta obat yang pasti untuk menyembuhkan penyakit ini, tetapi penyebarannya sudah merebak di banyak negara hampir seluruh dunia. Hingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan kasus COVID-19 sebagai pandemi, yang berarti sebuah keadaan peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua, dan umumnya menjangkiti banyak orang.<sup>1</sup> Ini artinya, penyakit yang memiliki gejala seperti demam tinggi, batuk kering, sakit tenggorokan, kelelahan, sesak nafas dan penurunan fungsi tubuh selama 14 hari ini bukan lagi ancaman suatu kota atau satu negara saja, tetapi menjadi ancaman bagi seluruh warga dunia. Pusat Krisis Kesehatan di bawah naungan Kementrian

---

<sup>1</sup> <https://www.sehatq.com/artikel/covid-19-ditetapkan-sebagai-pandemi-apa-artinya>, diakses pada 2 Mei 2020 pk1.21.39.

Kesehatan RI (PKK KEMKES) yang setiap hari memperbarui informasi terkait COVID-19 melaporkan per tanggal 6 April 2020, terdapat 1.276.302 kasus pasien positif COVID-19 di seluruh dunia. Sedangkan, di Indonesia sendiri pada tanggal yang sama tercatat ada 2.491 kasus kumulatif positif COVID-19 dengan rincian 192 kasus sembuh dan 209 kasus korban meninggal dunia akibat penyakit ini.<sup>2</sup> Selama pandemi COVID-19, WHO juga mengeluarkan beberapa kebijakan dan protokoler guna mencegah penularan virus Corona di seluruh negara. Salah satu kebijakannya adalah dengan menerapkan *Social Distancing*.

*Social distancing* secara bahasa artinya jarak sosial, hal ini merujuk pada pembatasan jarak. WHO merekomendasikan menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang lain. Sebagai bentuk penerapan himbauan tersebut, sejumlah langkah yang telah diterapkan di berbagai negara adalah meningkatkan ruang fisik di tengah khalayak ramai, termasuk menghabiskan waktu dengan tinggal di rumah (*stay at home*), berkegiatan di rumah seperti proses kegiatan belajar mengajar dan bekerja, membatasi tamu yang datang ke rumah, menghindari pertemuan besar, dan meminimalisir penggunaan transportasi umum. Namun, pada tanggal 20 Maret 2020, WHO mengubah istilah *social distancing* menjadi *physical distancing* karena dianggap lebih tepat. *Physical distancing* atau jarak fisik digunakan untuk merujuk pada menjaga jarak fisik antara diri sendiri dan orang lain.

Langkah ini dianggap memiliki dampak yang signifikan dalam membantu mencegah penyebaran virus, karena COVID-19 menyebar dari orang ke orang melalui droplet (percikan air liur atau ingus) ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Penggunaan istilah *physical distancing* juga diungkapkan oleh Dr Maria Kerkhove, seorang ahli epidemiologi WHO, merupakan harapan tersendiri agar meskipun masyarakat melakukan kegiatan di rumah saja tetapi tetap terhubung secara sosial dengan orang lain melalui berbagai media sosial. Hal ini karena kesehatan mental seseorang sama pentingnya untuk dijaga sebagaimana menjaga kesehatan fisik di tengah virus yang sedang mewabah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> <http://pusatkrisis.kemkes.go.id/covid-19-id/>, diakses pada 6 April 2020 pk1.21.47.

<sup>3</sup> <https://www.suara.com/tekno/2020/03/24/135802/who-ubah-istilah-social-distancing-jadi-physical-distancing-apa-alasannya>, diakses pada 6 April 2020 pk1.22.58.

Sebelum menerapkan sebuah program, dibutuhkan perencanaan komunikasi yang matang. Dalam perencanaan komunikasi terdapat berbagai tahapan termasuk pendekatan dan strategi. Tahapan-tahapan tersebut akan memudahkan penerapan program yang akan atau telah direncanakan. Contoh program yang akhir-akhir ini sedang hangat diperbincangkan dan sedang diterapkan adalah mengenai program kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemprov DKI Jakarta. DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menerapkan kebijakan PSBB dalam rangka percepatan penanganan pandemi *corona virus disease* 2019 (Covid-19). Penerapan PSBB ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 Tentang Penetapan PSBB di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang secara efektif diterapkan pada hari Jumat, 10 April 2020. Pemprov DKI menyadari bahwa PSBB akan berdampak kondisi perekonomian yang turun akibat wabah Covid-19 di Jakarta. Maka dari itu, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah, di antaranya melakukan sosialisasi baik melalui media sosial maupun melalui situs web yang dikelola pihak Pemprov, menyiapkan bantuan sosial pangan untuk warga miskin dan rentan miskin yang terdampak atas PSBB, hingga menindak tegas pelanggaran peraturan PSBB.

Tentunya tahapan-tahapan penerapan PSBB tersebut tidak akan berjalan lancar apabila pihak Pemprov DKI Jakarta –sebagai implementor tidak menggandeng jajaran pihak-pihak yang terkait. Misalnya, pihak Pemprov menggandeng aparat TNI dan Polri untuk membantu pendistribusian bantuan sosial pangan, serta melakukan patroli untuk pengawasan PSBB di jalan raya. Tidak lupa memegang prinsip *physical distancing*. Di samping itu, dalam mengimplementasikan perencanaan program memerlukan tenggang waktu yang jelas. Seperti halnya PSBB, pihak Pemprov telah mengumumkan bahwa PSBB akan dilaksanakan hingga 14 hari kedepan, hingga tanggal 24 April 2020. Namun apabila dirasa kurang maksimal, maka PSBB nantinya dapat diperpanjang hingga waktu yang belum ditentukan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis*. Metode ini membahas mendalam isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media

massa maupun elektronik. Analisis ini secara umum dapat diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis isi. Analisis isi secara umum dapat dimaknai sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai teks, tetapi disisi lain analisis menurut Holsti, metode analisis isi merupakan berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis dan generalis.<sup>4</sup>

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi adalah proses yang mentransformasikan suatu rencana ke dalam pelaksanaan.<sup>5</sup> Sedangkan Implementasi Perencanaan Komunikasi dapat diartikan sebagai langkah-langkah ketika menerapkan sebuah program yang akan atau telah direncanakan dengan menjabarkan tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tiap-tiap sasaran dengan perspektif aspek komunikasi.<sup>6</sup> Dalam makalah ini, yang termasuk dalam perencanaan komunikasi adalah mengenai perencanaan komunikasi dalam kebijakan PSBB DKI Jakarta. Pengertian implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan.<sup>7</sup> Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui perencanaan tahapan-tahapan strategi, kemudian *output* perencanaan tersebut dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan perencanaan program yang bersangkutan.<sup>8</sup> Implementasi yang efektif membutuhkan kepemimpinan yang tepat, proses komunikasi yang konstruktif dan sistem akuntabilitas yang disepakati.

#### **1. Tahapan Implementasi**

Berikut adalah beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan sebelum memulai tahap implementasi:

- a. Pelaksana program perlu mendiskusikan dan menyetujui langkah pertama yang harus diambil, kapan akan diambil dan menentukan siapa yang

---

<sup>4</sup> Holsti, 1969.

<sup>5</sup> Bernardine R. Wirjana, *Mencapai Manajemen Berkualitas: Organisasi, Kinerja, dan Program*,

<sup>6</sup> Bernardine R. Wirjana, *Mencapai Manajemen Berkualitas...*, hal. 213

<sup>7</sup> Retina Sri Sedjati, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta, Deepublish, 2015), hal. 140

<sup>8</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 65

bertanggung jawab untuk memulai tindakan.

- b. Pelaksana program perlu mengidentifikasi kebutuhan untuk mendukung dan menentukan pihak mana saja yang terlibat melaksanakan program tersebut.
- c. Pelaksana program perlu menyetujui mekanisme jangka pendek untuk melaporkan bila ada kemajuan atau perubahan.<sup>9</sup>

## **2. Bahan-bahan Pelaksanaan Implementasi**

Agar kegiatan implementasi dapat berjalan sesuai rencana, maka dibutuhkan bahan-bahan berikut yang dapat mempengaruhi keberhasilannya:<sup>10</sup>

### **a. Komunikasi**

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan, membutuhkan adanya pemahaman standart dan tujuan kebijakan dari masing-masing individu yang bertanggung jawab melaksanakannya. Oleh karena itu standard dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas agar tidak menimbulkan distorsi implementasi. Jika standart dan tujuan tidak diketahui dengan jelas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dapat menimbulkan salah pengertian yang dapat menghambat implementasi kebijakan. Komunikasi kebijakan mencakup dimensi transmisi (*transmission*), transformasi (*transformation*) dan kejelasan (*clarity*).

Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas, sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut. Jika mereka tidak jelas, maka mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pada prinsipnya komunikasi kebijakan merupakan suatu komunikasi yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan, dapat diterjemahkan sebagai suatu penyampaian pesan,

---

<sup>9</sup> <https://blog.retail.org.au/newsandinsights/implementing-action-plans> diakses pada 20 Mei 2020

<sup>10</sup> Retina Sri Sedjati, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta, Deepublish, 2015), hal. 140

program dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Negara. Sehingga komunikasi kebijakan juga tidak akan terlepas dari permasalahan dalam komunikasi organisasi.<sup>11</sup>

Komunikasi kebijakan dapat membantu masyarakat menemukan norma-norma baru dan keharmonisan dalam mengimplementasikan kebijakan. Komunikasi kebijakan juga dapat membantu implementor dan sasaran target untuk saling bekerjasama mencapai tujuan kebijakan. Isi Kebijakan menurut Merille S Grindle, adanya kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program kebijakan, sumber daya yang dikerahkan. Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.<sup>12</sup>

Salah satu bentuk dari komunikasi adalah koordinasi. Koordinasi ialah sinkronisasi dan penyatuan tindakan-tindakan atau berbagai ragam aktivitas sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, koordinasi ialah proses integrasi.<sup>13</sup>

#### b. Pengaturan sumberdaya

Sumber daya merupakan variabel yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Meskipun kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas kepada aparat pelaksana, tetapi jika tidak didukung oleh tersedianya sumber daya secara memadai untuk pelaksanaan kebijakan, maka efektivitas kebijakan akan sulit dicapai. Sumber daya hal ini meliputi: dana, sumber daya manusia (staf), dan fasilitas lainnya. Oleh karena itu, agar sumber daya yang ada dapat

---

<sup>11</sup> Kirana Kawengian, dkk., *Peranan Komunikasi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Bersih Kampung (Studi Pada Pemerintah Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur)*, e-journal "ActaDiurna" Volume VI. No. 2. Tahun 2017

<sup>12</sup> Dian Esti Nurati, *Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berbasis Pada Kearifan Lokal (Kajian Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta)*, Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Vol 2, No 01 (2016)

<sup>13</sup> Retina Sri Sedjati, *Manajemen Strategis...*, hal. 88

menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, maka sumber daya harus dipersiapkan sedini mungkin sehingga pada saat dibutuhkan sudah tersedia sesuai kebutuhan.

c. Dispositions (Sikap Pelaksana)

Dispositions dimaksudkan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementor*) untuk melaksanakan kebijakan, pelaksana kebijakan tidak hanya dituntut kemampuan dan kemauannya secara sungguh-sungguh dalam melaksanakan kebijakan, tetapi juga dituntut untuk mampu membawa kebijakan tersebut ke arah yang diinginkan atau diharapkan. Semua itu dapat terwujud jika pelaksana mendukung tujuan kebijakan. Sebaliknya sikap pelaksana yang cenderung menolak kebijakan, akan menyebabkan mereka gagal melaksanakan kebijakan.

d. Pelaporan

Pelaporan dalam implementasi mencakup mengenai kemajuan, pencapaian target, biaya, masalah yang dihadapi, tindakan korektif.<sup>14</sup> Pembuat kebijakan sebaiknya mewajibkan para implementor menyampaikan kepadanya laporan-laporan mengenai kemajuan pada berbagai titik implementasi program. Laporan dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Yang sangat penting diingat pada waktu membuat laporan kemajuan (*progress report*) ialah pekerjaan dan hasil aktual harus dibandingkan dengan rencana implementasi (*action plan*) dan sasaran yang harus dicapai. Dengan cara ini, dapat dilihat kegiatan mana yang sudah maupun yang belum tepat. Perbandingan tersebut dapat membantu untuk tetap fokus pada apa yang dicapai dan dapat mengidentifikasi masalah yang harus diselesaikan serta penyimpangan yang harus diluruskan atau dikoreksi.<sup>15</sup>

### **3. Ukuran Pelaksanaan Implementasi**

Dalam pelaksanaannya, implementasi biasanya terdiri dari:

- a. Menjelaskan kepada semua lembaga maupun stakeholder yang terlibat, peran-peran dan tanggung jawab masing-masing serta mengikut-sertakan mereka secara penuh. Jadi, sangatlah penting untuk mendefinisikan dengan pasti tanggung jawab masing-masing individual maupun kolektif.
- b. Mempersiapkan rencana-rencana tindakan atau *action plans* dengan

---

<sup>14</sup> Bernardine R. Wirjana, *Mencapai Manajemen Berkualitas...*, hal. 35

<sup>15</sup> Ibid, hal. 36



spesifikasi batas waktu implementasi. Secara rinci menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan.

- c. Menyusun kebijakan, peraturan, dan pengaturan kerja, baik yang menyangkut segi ekonomi, sosial, atau memperkuat kebijakan yang sudah ada.
- d. Mempersiapkan program dan proyek serta mobilisasi sumber-sumber untuk implementasinya. Program dan proyek merupakan alat utama untuk menerjemahkan sasaran-sasaran yang telah ditentukan ke dalam aktivitas-aktivitas yang konkret.
- e. Memerlukan komunikasi publik yang baik. Karena komunikasi publik yang baik dapat menumbuhkan partisipasi penuh dari masyarakat. Selain itu dapat menjadi alat untuk mencegah konflik. Media nasional maupun lokal memainkan peran penting dan vital dalam penyampaian informasi kepada khalayak atau stakeholder tentang kemajuan program, mengekspresikan konsensus yang dicapai, menimbulkan pengertian yang lebih luas tentang kebijakan program yang berkelanjutan, serta menggalang partisipasi.<sup>16</sup>

#### **D. Analisis Implementasi Perencanaan Komunikasi dalam Pelaksanaan PSBB oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

Apabila ditinjau dari segi perencanaan komunikasi, komunikasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengimplemantasikan PSBB kepada jajarannya mengadopsi komunikasi organisasi. Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss yang dikutip oleh Arif Yusuf Hamali, ciri utama komunikasi organisasional adalah faktor-faktor struktural dalam organisasi yang mengharuskan para anggotanya bertindak sesuai dengan peranan yang diharapkan.<sup>17</sup> Dalam hal ini yang dimaksud oleh organisasi adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian membawahi struktural Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan, Dinas, Biro, dan Satpol PP.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Bernardine R. Wirjana, *Mencapai Manajemen Berkualitas...*, hal. 36

<sup>17</sup> Arif Yusuf Hamali, Eka Sari Budihastuti., *Pemahaman Praktis Administrasi, Organkomunikasi, dan Manajemen (Strategi Mengelola Kelangsungan Hidup Organisasi)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 191-192

<sup>18</sup> <https://ppid.jakarta.go.id/struktur-organisasi-dki> diakses pada 20 Mei 2020

Struktural dalam organisasi inilah yang menjadi implementor PSBB DKI Jakarta. Para implementor tersebut memiliki tugas dan peranannya masing-masing dalam kegiatan PSBB DKI Jakarta ini. Seperti Satpol PP yang bertugas mengamankan warga apabila ada yang melanggar PSBB.

Selama Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta berkomunikasi untuk bekerja sama dalam penyampaian informasi, instruksi dan lain sebagainya dengan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai implementasi PSBB melalui FGD (rapat koordinasi), dokumen surat resmi, konferensi pers, dan negosiasi. Seperti yang dicetuskan oleh Joseph A. Devito yang dikutip oleh Arif, bahwa cara kerja komunikasi organisasi dapat berupa melalui memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat resmi.<sup>19</sup>

Selain mengadopsi komunikasi organisasi, pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengadopsi bentuk komunikasi publik dan massa. Komunikasi publik melalui sosialisasi, dan komunikasi massa melalui infografis yang dibagikan melalui media massa maupun media baru. Terkait dengan pengawasan implementasi PSBB, langkah komunikasi yang telah dilakukan termasuk bentuk komunikasi publik. Namun dalam bentuk komunikasi publik tersebut masih terdapat kendala, salah satunya kendala ketidakjelasan peraturan yang berasal dari Kementerian Perhubungan mengenai kebijakan penggunaan alat transportasi pribadi dan umum.

Hal ini disampaikan melalui siaran pers pada Senin 13 April 2020 oleh Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Research Adinda Tenriangke Muchtar, yang menilai bahwa komunikasi publik yang dilakukan pemerintah dalam menangani Covid-19 tidak jelas dan terkadang bertentangan satu sama lain. Salah satu buktinya adalah tampak dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Menurutnya, isi Permenhub 18/2020 tersebut ambigu tentang pembatasan penggunaan alat transportasi pribadi dan umum.

Di satu sisi, di Pasal 11 Ayat 1 huruf c, membatasi penggunaan kendaraan roda dua hanya untuk mengangkut barang, namun di huruf d malah

---

<sup>19</sup> Arif Yusuf Hamali, Eka Sari Budihastuti., *Pemahaman Praktis Administrasi..*, hal. 192

memungkinkan pengangkutan orang dengan protokol ketat. Dari keterangan itu, sudah jelas bahwa hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Permenhub juga dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), serta Peraturan Gubernur (Pergub) yang ada terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang sudah diterapkan seperti di Provinsi DKI Jakarta dan sebagian Jawa Barat serta Banten.

Agar kendala pengawasan PSBB ini segera terselesaikan, diharapkan pemerintah harus membenahi koordinasi lintas sektor dan memastikan kebijakan yang dihasilkan sinkron serta mendukung pelaksanaan PSBB. Namun apabila mencermati isi Permenhub, sebenarnya dapat dikatakan bahwa tidak ada pertentangan dengan Permenkes atau Pergub. Sebab, Permenhub menegaskan bahwa angkutan sepeda motor berbasis aplikasi hanya dapat mengangkut barang. Ini diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf c. Namun, Kemenhub kemudian menyatakan bahwa ojek online dapat mengangkut penumpang berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) huruf d. Padahal, ayat itu hanya mengatur tentang ketentuan umum mengenai sepeda motor, dan tidak spesifik mengatur terkait ojek online.<sup>20</sup> Kemudian dalam hal penerapan tindakan atau sanksi, pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengomunikasikan kepada masyarakat dan antar stakeholder menggunakan komunikasi persuasif, humanis, dan edukatif. Apabila metode komunikasi tersebut dinilai tidak mampu mengatasi pelanggaran PSBB, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah menggunakan komunikasi koersif.<sup>21</sup>

Apabila menilik dari kondisi lapangan, masih ditemukannya banyak pelanggar. Ketika status PSBB DKI Jakarta diberlakukan telah berlangsung selama 4 hari, ternyata masih ada warga yang tidak peduli. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus yang menuturkan bahwa terdapat dua kriteria perilaku pengendara selama PSBB di Jakarta. Ada yang tidak tahu sama sekali dan tahu tapi masih tak acuh.

---

<sup>20</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/12455931/permenhub-dinilai-jadi-bukti-pemerintah-punya-masalah-komunikasi-publik?page=all#page3> diakses pada 20 Mei 2020

<sup>21</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4970548/muncul-saran-opsi-penindakan-saat-psbb-dari-persuasif-hingga-kerja-sosial?single=1> diakses pada 20 Mei 2020

Ketidapatuhan banyak ditemukan saat warga berkendara tidak menggunakan masker. Walaupun seperti itu, aparat kepolisian tetap memberikan pendekatan persuasif dan edukasi kepada masyarakat terkait aturan protokol kesehatan yang berlaku. Contoh dari bentuk komunikasi persuasif adalah saat petugas memberhentikan kendaraan yang pengendaranya tidak menggunakan masker, maka akan dihimbau yang bersifat edukasi, seperti, “*Pak, bapak tahu enggak ketentuannya harus pakai masker, wajib itu*”. Setelah itu, bagi pelanggar aturan PSBB pertama kali akan diminta untuk menuliskan surat pernyataan tidak akan mengulang lagi. Kemudian, petugas menginput data-data pribadi yang tertera di Surat Izin Mengemudi (SIM) ke database. Pengendara yang tidak menaati aturan PSBB di DKI Jakarta akan mendapat teguran secara tertulis. Teguran secara tertulis dilakukan agar pengendara tidak mengulangi lagi. Misalnya, ditemukan pengendara yang tidak mengenakan masker saat melintas di Jakarta. Jika kedua kali (melanggar), bisa dikenakan sanksi yang tegas berupa penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2018.<sup>22</sup>

Selain itu, masih ditemukannya pelanggaran oleh perusahaan yang masih nekat beroperasi padahal tidak termasuk delapan sektor yang diperbolehkan. Hampir sama seperti yang dilakukan oleh pengendara yang tidak memakai masker, penindakan pelanggaran tersebut dilakukan dengan komunikasi persuasif dan koersif. Bentuk penindakan yang dapat dikategorikan sebagai komunikasi persuasif adalah pihak Pemerintah Provinsi DKI bernegosiasi dengan pihak perusahaan tersebut. Ada yang masih boleh beroperasi asalkan menerapkan protokol tetap yang telah diwajibkan. Namun ada pula perusahaan yang nekat beroperasi walau bukan termasuk delapan sektor tersebut. Penindakannya dapat berupa penutupan secara paksa, denda, hingga pencabutan izin usaha.<sup>23</sup>

Penerapan sanksi tegas tersebut dapat dikategorikan sebagai komunikasi koersif. Komunikasi koersif adalah metode komunikasi yang menekan atau memaksa ketika pemberian instruksi. Metode ini menerangkan bahwa untuk

---

<sup>22</sup> <https://www.inews.id/news/megapolitan/polisi-sebut-ada-warga-dki-jakarta-yang-tak-peduli-selama-psbb> Diakses pada 21 Mei 2020

<sup>23</sup> <https://rmco.id/baca-berita/megapolitan/33711/izin-dicabut-dan-denda-rp-100-juta-nggak-ada-ampun-bagi-usaha-yang-langgar-psbb> Diakses pada 21 Mei 2020

mempersuasi seseorang atau sekelompok orang agar mereka berubah sikap, maka komunikator atau persuader akan mengirimkan pesan dengan cara menekan, memaksa, atau memberikan instruksi dengan ancaman dan sanksi.<sup>24</sup>

#### **E. PENUTUP**

Dalam implementasi kebijakan PSBB di wilayah DKI Jakarta, sudah berjalan sesuai rencana pihak Pemerintah Provinsi DKI walau masih ditemukannya pelanggaran. Namun masih diperlukannya koordinasi yang lebih intens untuk memastikan kelancaran implementasi PSBB dan tidak ada pertentangan maupun kesalahpahaman dari berbagai pihak. Kemudian untuk meminimalisir pelanggaran yang dapat terjadi selama PSBB, para petugas yang terlibat juga perlu rutin untuk memberikan sosialisasi edukasi terhadap masyarakat, hal ini perlu dilakukan agar dapat menimbulkan masyarakat akan mematuhi. Mungkin awalnya masyarakat akan merasa ‘terpaksa’ ketika akan melakukannya. Namun dengan seiring berjalannya waktu, masyarakat akan terbiasa mematuhi peraturan dan menyadari betapa pentingnya melakukan pencegahan penularan virus corona (covid-19).

---

<sup>24</sup> Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 300

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id).  
Diakses pada tanggal 28 Maret 2020
- Hafied Cangara. 2013. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta :  
RajawaliPers.
- Hamad, Ibnu. *Perencanaan Program Komunikasi*.
- Hamali, Arif Yusuf. Eka Sari Budihastuti. 2010. *Pemahaman Praktis Administrasi, Organkomunisasi, dan Manajemen (Strategi Mengelola Kelangsungan Hidup Organisasi)*. Jakarta: Kencana, 2010
- Kawengian, Kirana., dkk., *Peranan Komunikasi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Bersih Kampung (Studi Pada Pemerintah Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur)*, e-journal "Acta Diurna" Volume VI. No. 2. Tahun 2017
- Kenmada Widjajanto, dkk. 2013. *Perencanaan Komunikasi: Konsep dan Aplikasi*, Bandung: Ultimus.
- Liliweri, Alo. 2010. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana
- Nurati, Dian Esti. *Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berbasis Pada Kearifan Lokal (Kajian Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta)*, Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Vol 2, No 01 (2016)
- Rulli Nasrullah. 2017. *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Sedjati, Retina Sri. 2015. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta, Deepublish
- Siti Muyasaroh, jurnal Haritage, 2013 - [jurnal.yudharta.ac.id](http://jurnal.yudharta.ac.id). *kampanye Perubahan Sosial (Kesadaran Masyarakat, Aspek Perubahan Kognitif dan Prilaku)*. (Pasuruan)
- Suranto AW. 2019. *Perencanaan dan Evaluasi Program Komunikasi*. Yogyakarta : Pena Pressindo.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wirjana, Bernardine R. 2007. *Mencapai Manajemen Berkualitas: Organisasi*,